

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan rekrutmen anggota Polri oleh Polda DIY dari kalangan penyandang disabilitas sudah dilaksanakan. Penerimaan penyandang disabilitas di Polda DIY dibagi menjadi dua jalur, yaitu melalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan Anggota Polri. Program rekrutmen PNS Polri untuk penyandang disabilitas telah dimulai sejak tahun 2019, sementara rekrutmen untuk Anggota Polri baru dimulai pada tahun 2024, akan tetapi meskipun rekrutmen tersebut telah diterapkan, hingga saat ini belum ada anggota Polda DIY yang direkrut melalui program khusus penyandang disabilitas yang aktif bekerja sebagai pegawai di Polda DIY. Mengacu pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur bahwa dalam proses penerimaan anggota dilakukan secara sentralisasi. Untuk PNS Polri, mengikuti jadwal penerimaan PNS pada umumnya yang merupakan program rekrutmen dari pemerintah seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Adapun pelaksanaan penerimaan anggota Polri itu tentunya terdapat hambatan- hambatan serta tantangan. Hambatan dapat berasal dari Internal maupun Eksternal Polda DIY. Hambatan internal, seperti

keterbatasan terkait arahan dari Mabes dan Kualifikasi para kandidat belum terpenuhi, adanya kriteria- kriteria yang itu dapat membuat para penyandang disabilitas dibatasi. Adapun hambatan eksternalnya adalah sedikit pendaftar dari kalangan penyandang disabilitas, kendala administrasi dalam proses seleksi kesehatan. Selain hambatan Polda DIY juga menghadapi tantangan berupa: pertama stigma sosial terhadap penyandang disabilitas; kedua, kesulitan menyesuaikan standar seleksi dengan kondisi penyandang disabilitas; ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan rekrutmen disabilitas; dan keempat minimnya dukungan dari pihak eksternal.

B. Saran

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas di Polda DIY terbagi menjadi dua jalur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri dan Anggota Polri. Penerimaan Anggota Polri dari penyandang disabilitas merupakan program baru yang dijalankan oleh Polda DIY dan itu langsung merupakan perintah dari Mabes Polri yaitu baru diadakan pada tahun 2024 untuk itu Polda DIY sebagai pelaksana di daerah untuk perekrutan anggota mesti belajar cukup banyak untuk melaksanakan program tersebut. Agar diharapkan ke depannya program ini dapat terlaksana lebih baik pada penerimaan anggota polri di periode tahun berikutnya.

2. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Polda DIY dalam implementasi kebijakan ini perlu dipelajari dan diselesaikan satu per satu agar rekrutmen penyandang disabilitas dapat berjalan lebih baik di masa depan. Seperti meningkatkan sosialisasi dan kampanye publik ke tempat komunitas atau organisasi penyandang disabilitas dan melakukan lebih luas lagi bekerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang peluang kerja di kepolisian. Selanjutnya untuk menghadapi hambatan internal, Polda DIY perlu mempersiapkan sistem dan prosedur rekrutmen dengan lebih matang pada seleksi berikutnya. Sementara itu, dalam mengatasi hambatan eksternal, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Polda DIY dan pemerintah pusat agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Selain itu, berbagai tantangan dalam proses rekrutmen dapat dijadikan sebagai rambu-rambu evaluasi bagi Polda DIY dalam menyusun strategi penerimaan penyandang disabilitas di periode mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashila, Bestha Inatsan, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkungan Pengadilan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dewi, Imma Indra. E, 2015, Kesetaraan Penyandang Diisabilitas, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Kartina Rita, Atik Krustiyati, 2023, Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indoneisa, Damera Press, Jakarta Selatan.
- Lintangsari, Alies Poetri dkk. 2016. Buku Panduan Aksesibilitas Layanan, Universitas Brawijaya, Malang.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Nasution Abdul Fattah, 2023, Metode Penelitian Kualitatif, Harfa Creative, Bandung.
- R, Despan, dkk. 2021. Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Riyadi, Eko, dkk. 2021. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Yogyakarta.
- Widijantoro, Johannes, dkk. 2019. Analisis Putusan Difabel Berhadapan Dengan Hukum., SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia, Yogyakarta.

Hasil Penelitian

- Ulfatimah, Hernita. A, 2020, Implementasi Tabungan Baitullah IB Hasanah Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember”, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jurnal Hukum

- Alizah Bella, dkk. 2023, Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN, *Journal on Education*, Vol 05/ No-03/Maret-April /2023, *Journal on Education*.
- Andre Priyaden, dkk. 2024, “Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”, *Customary Law Journal*, Vol2/No-01/2024, Pubmedia.
- Azzahra, Alya Fatimah, 2020, “Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children”, *Journal Of Creativity Student*, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2020, Universitas Negeri Semarang.
- Hidayatullah, Fajri dan Khaerul Umam Noer, 2021, “Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di BUMD DKI Jakarta”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6/No- 02/Desember/2021, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mandini, Denda Devi Sarah, 2020, “Pro dan Kontra Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Cakara Prabu*, Vol.4 Nomor 2 Desember 2020, *Jurnal Cakara Prabu*.
- Napitupulu, Binur Pretty dan Ivan Benedict, 2019, “Hubungan Penempatan Dan Pengembangan Pegawai Dengan Prestasi Kerja Pada Pardede Internasional Hotel Medan”, *Jurnal Akomodasi Agung*, Vol. 4 Nomor 1 April 2019, *Jurnal Akomodasi Agung*.
- Trisnawati, Anggita, dkk. 2023,” Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN”, *Journal on Education*, Vol. 05/ No-03/Maret-April/2023, *Journal on Education*.
- Violetta, Cicilia Alda dan Heru Susetyo, 2023, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum dan Pranata*, Vol. 5/No-02/Juli-Desember/2023, *Jurnal Hukum dan Pranata*.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretaris Daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Internet

Dinas Kesehatan Polda, Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, diakses 9 November 2024.

Hukumku.id, Memahami Perbedaan Polsek, Polres, dan Polda dalam Struktur Kepolisian Indonesia, dalam laman <https://www.hukumku.id/post/polsek-polres-dan-Polda>, diakses 29 Oktober 2024.

Jamil. M “Pendidikan Dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, <https://www.hukumpedia.com/jamilncera/pendidikan-dan-pengakuan-hukum-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses pada 15 Oktober 2024.

Kapolri Nomor : Peng/ 17/IV/Dik.2.1./2024 tanggal: 4 April 2024 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024, <https://penerimaan.polri.go.id/uploads/pdf/PENGUMUMAN%20BI>

[NTARA%20POLRI%20GELOMBANG%20II%20TAHUN%20ANGGARAN%202024.pdf](#), diakses pada 20 Januari 2025.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Struktur Organisasi, <https://jogja.polri.go.id/Polda/profil/struktur-organisasi.html>, diakses pada 17 Januari 2025.

Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Peringatan Hari Disabilitas Nasional: Penting Pelibatan Bermakna Perempuan Disabilitas dalam Pembangunan Inklusi yang Berkeadilan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-%20perempuan-dalam-peringatan-hari-disabilitas-nasional-penting-pelibatan-%20bermakna-perempuan-disabilitas-dalam-pembangunan-inklusi-yang-%20berkeadilan>, diakses 9 November 2024.

Pakis.id, Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas <https://pakis.id/wp-content/uploads/2018/07/konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.pdf>, diakses 17 Januari 2025.

Perkim.id, PKB Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam laman [https://perkim.id/profil-pkp/profil-%20provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa%20%20yogyakarta/#iLightbox\[gallery1019\]/0](https://perkim.id/profil-pkp/profil-%20provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-istimewa%20%20yogyakarta/#iLightbox[gallery1019]/0), diakses 29 Oktober 2024.lexi

Saputra, Andi, Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI, <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>, diakses 9 November 2024.

Erlin Sudarwati, Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAM Dan TNI, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-%20disabilitas.html#>, diakses 19 Januari 2025.

Shidarta, Semiotika Terminologi Tenaga Kerja, Buruh, Pekerja, Pegawai Dan Karyawan, <https://business-law.binus.ac.id/2015/05/01/semiotika-terminologi-tenaga-kerja-buruh-pekerja-pegawai-dan-karyawan/>, diakses 26 Oktober 2024.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 458/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

25 November 2024

Kepada
Yth. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condong Catur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Yuli Hutajulu
2. Nomor Mahasiswa : 210514359
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing II : -
7. Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENERIMAAN PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN POLDA DIY
7. No. Handphone / WA : 082278054922

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dr. Kumari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dengan bapak Komisaris Polisi Bintarto Bayu Sakti, S.E.,S.I.K selaku Kepala Sub Bagian Penyediaan Personel Bagian pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda DIY



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dengan bapak Inspektur Polisi Tingkat Dua Wawan Tribowo,S.M. selaku Pervira Urusan Sub Bagian Seleksi Bagian pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia, Polda DIY



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dengan bapak Inspektur Polisi Tingkat Dua Wawan Tribowo, S.M. selaku Perwira Urusan Sub Bagian Seleksi Bagian pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia, Polda DIY